

RENCANA STRATEGIS PELAYANAN PERIZINAN

Dedy Darmawan dan Ernawati

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Strategic Plan Licensing Services. The purpose of this study was to determine the evaluation of strategic planning in the years 2009-2013 Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Riau Province. This study included descriptive quantitative research category. The process of determining population and sample, variables operationalisasi research, data collection techniques, frameworks and techniques used in analyzing the data carried by a quantitative approach. The results of evaluation of strategic plan 2009-2013 in Riau province BP2T included in the category quite well. This is because in evaluating the strategic plan 2009-2013 in Riau province BP2T using indicators of planning, organizing, actuating and controlling that is needed in the preparation and in the implementation of the strategic plan.

Abstrak: Rencana Strategis Pelayanan Perizinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi renstra tahun 2009-2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Proses penentuan populasi dan sampel, operasionalisasi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka berfikir dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian evaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau termasuk pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau menggunakan indikator-indikator planning, organizing, actuating dan controlling yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan renstra.

Kata Kunci: Evaluasi, Renstra, Pelayanan, POAC

PENDAHULUAN

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan perizinan tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma ke-

adilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan yang bersifat perizinan dan lain-lain.

Kendati mungkin fenomena korupsi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk tadi hanya melibatkan biaya transaksi (antara sektor publik dengan individu masyarakat) yang relatif kecil (*pretty corruption*), tetapi biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar. Karena itu pola korupsi dengan menggunakan instrumen produk-produk pelayanan tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas. Masalahnya kemudian adalah bagaimana meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut. Sangat sulit tentunya menjawab pertanyaan ini,

kendati jawabannya merupakan bagian terpenting dari strategi pemberantasan korupsi di sektor publik. Karena itu kajian mengenai mekanisme pelayanan perizinan, berikut biaya-biaya transaksinya menjadi elemen penting dari strategi pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan itu, prinsip *market oriented* organisasi pemerintahan harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga prinsip *catalistic government*, mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai katalisator dan bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi pemerintah lebih dititikberatkan sebagai regulator dibanding implementator atau aktor pelayanan. Sebagai imbangannya, pemerintah perlu memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sendiri sebagai penyedia atau pelaksanaan jasa pelayanan umum. Dengan kata lain, tugas pemerintah adalah membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri (*helping people to help themselves*). Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan prinsip *self-help* atau *steering rather than rowing*.

Perencanaan strategis sebagai suatu proses untuk menghasilkan Rencana Strategis diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan baru ditetapkan melalui peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, BP2T Provinsi Riau merupakan salah satu badan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pedoman bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

BP2T Provinsi Riau menyusun renstra untuk tahun 2009-2013 sebagai berikut:

I. Program satuan kerja perangkat daerah / SKPD.

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- Program peningkatan disiplin Aparatur.
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.

II. Program urusan wajib.

- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi.
- Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan.
- Program penertiban, monitoring, evaluasi, pengamanan, pengaduan, perizinan dan non perizinan.
- Program penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu.

Tujuan disusunnya Rencana strategis BP2T Propinsi Riau tahun 2009-2013 adalah :

- Merupakan dokumen operasional indikatif RPJM Propinsi Riau yang menjadi tugas dan fungsi BP2T Propinsi Riau.
- Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan BP2T Propinsi Riau.
- Mewujudkan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan BP2T Propinsi Riau yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
- Memberi pedoman dan alat pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan BP2T Tahun 2009-2013.

Renstra tahun 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau ternyata tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan kurang adanya evaluasi terhadap renstra tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam penyusunan renstra dan ketidak siapan pegawai dalam hal pelaksanaan rencana dan sumber pendanaan yang kurang memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi renstra tahun 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Proses penentuan populasi dan sampel, operasionalisasi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka berfikir dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tujuan penelitian, data dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada, indikator-indikator diukur sesuai dengan kerangka berfikir dan kondisi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Rencana Strategis 2009-2013 BP2T Provinsi Riau

Evaluasi renstra BP2T tahun 2009-2013 dianalisis dengan menggunakan indikator evaluasi pengelolaan suatu perencanaan menurut G.R. Terry, yaitu dengan kriteria Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC) dengan penjelasan sebagai berikut:

Planning (perencanaan)

Pembuatan renstra BP2T tahun 2009-2013 dimulai dengan membuat perencanaan. Perencanaan adalah membuat serangkaian kegiatan di masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penetapan tujuan, penentuan alokasi sumber daya dan cara pencapaiannya. Indikator perencanaan dalam penelitian ini untuk

mengetahui apakah perencanaan pembuatan renstra pada BP2T telah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang jelas dalam pembuatan dan pelaksanaan renstra.
2. Penetapan sasaran dan tujuan renstra.
3. Penentuan solusi terhadap permasalahan.

Organizing (pengorganisasian)

Organisasi berarti mengatur, oleh karenanya pengorganisasian adalah merupakan pengaturan dan pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam satu kesatuan atau kelompok organisasi. Yang menjadi indikator pengukuran organizing pada penelitian ini adalah:

1. Perincian kerja yang jelas.
2. Penempatan dan pembagian tugas.
3. Pembagian kewajiban.

Actuating (pengarahan)

Pengarahan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada anggota organisasi, agar kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sebelum melakukan evaluasi terlebih dahulu adanya pengarahan dari pimpinan organisasi agar hasil evaluasi diperoleh sesuai dengan rencana yang telah disusun. Indikator actuating pada penelitian ini adalah :

1. Rapat koordinasi dengan instansi terkait.
2. Perintah-perintah yang diberikan
3. Penjelasan mengenai aturan-aturan maupun kebijakan.

Controlling (pengawasan)

Merupakan pengawasan yang dilakukan baik sebelum pelaksanaan renstra, sedang berjalannya kegiatan maupun sesudah pelaksanaan renstra dilakukan. Hal ini berlaku juga sebelum evaluasi dibuat oleh pimpinan bagian pelayanan terpadu dalam menyusun renstra 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau. Indikator yang digunakan pada pengawasan ini adalah :

1. Pengawasan dalam penyusunan renstra.
2. Pengawasan dalam pelaksanaan renstra.
3. Pengawasan dalam membuat laporan renstra.

Faktor-faktor yang Menghambat Evaluasi Renstra 2009-2013 BP2T Provinsi Riau

Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 BP2T Provinsi Riau. Hal ini menyebabkan penyusunan renstra 2009-2013 pada BP2T belum mencapai pada kategori baik, walaupun pegawai yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan renstra tersebut memiliki tingkat pendidikan tamat S1. Hal ini dikarenakan pegawai tersebut belum diberikan pendidikan dan latihan dalam penyusunan renstra yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, rata-rata pegawai belum seluruhnya memahami pedoman penyusunan renstra tersebut.

Peralatan (teknologi)

Peralatan (teknologi) di sini adalah peralatan yang digunakan dalam penyusunan maupun dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 BP2T Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ternyata peralatan (teknologi) yang digunakan, belum mencapai pada kategori baik. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan, sarana dan prasarana baru pada kategori cukup memadai, seperti ruangan yang tersedia masih belum dapat menampung pegawai untuk melakukan diskusi dalam penyusunan renstra, sarana dan prasarana seperti ruangan pegawai tempat bekerja kurang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, begitu juga halnya dengan peralatan yang digunakan untuk mengoperasionalkan penyusunan renstra tersebut masih terbatas.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian evaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau termasuk pada kategori cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari 18 orang responden (45,00) yang memberikan tanggapannya. Hal ini dikarenakan dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau menggunakan indikator-indikator *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan renstra.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Dwiyanto, "Pemerintahan yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?" dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Yogyakarta: MAP UGM, Vol. I, No.2, Juli 1997.
- Ekowati, 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*, Surakarta: Pustaka Cakra.
- Galbraith, Jay R. 1977. *Organization Design*. Addison-Wesley, Reading, Mass.
- Miftah Thoha, 2003. *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nurcholis, 2005. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suharto, Edi (2008b), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Terry, G.R, 2006. *Principle Of Manajement*, Bandung: PT. Alumni.